

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara wajib untuk mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan tuntutan akan akuntabilitas tersebut maka Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan

yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Minahasa 2025-2029.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD kabupaten Minahasa, diantaranya adalah :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah.

Adapun dalam mencapai Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Minahasa menetapkan strategi yang harus ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset berbasis IT;
2. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja;
4. Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;
5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;
6. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;
7. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT yang efisien dan efektif;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset;

9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
10. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan pihak ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

1.2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1. TUGAS POKOK

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.3.2. FUNGSI

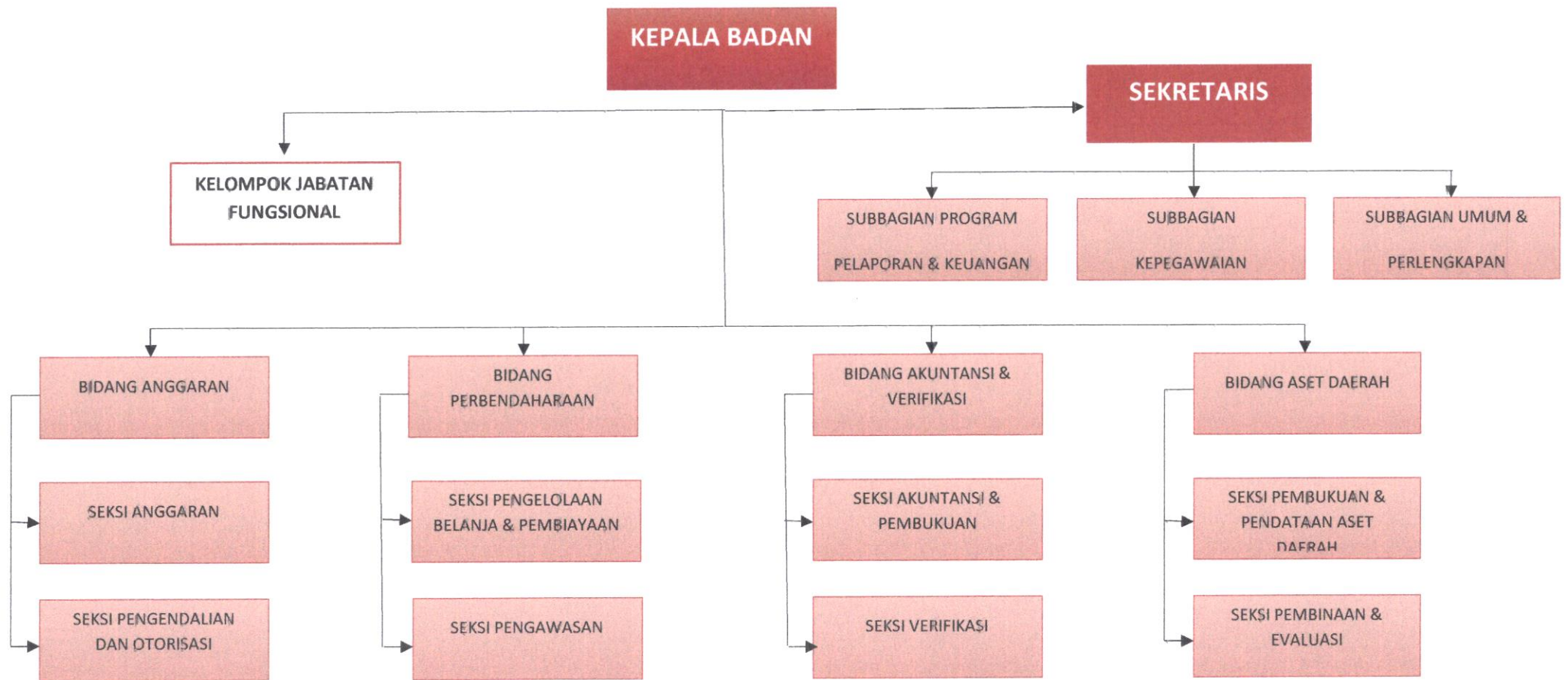
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi meliputi

- a) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b) Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD bersama TAPD;
- c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e) Pengkoordinasian Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Badan maupun Instansi atau unit kerja lain yang terkait;
- f) Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
- h) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- i) Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
- j) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



1.5. SUMBER DAYA

Sumber daya yang tergambar dalam laporan ini terdiri dari kondisi sumber daya manusia yaitu individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan perusahaan, dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan serta kondisi sarana dan prasarana kerja yang menggambarkan kondisi peralatan dan perlengkapan penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi

1.5.1. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN STATUS JENJANG JABATAN

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PEJABAT ESELON II	1 Orang
2	PEJABAT ESELON III	5 Orang
3	PEJABAT ESELON IV	11 Orang
4	PELAKSANA	13 Orang
5	FUNGSIONAL	Orang
6	TENAGA NON ASN	14 Orang
	JUMLAH	44 Orang

BERDASARKAN GENDER, PENDIDIKAN DAN KEPANGKATAN

GOL	LAKI - LAKI						PEREMPUAN					
	S3	S2	S1	D3	SMA	JML	S3	S2	S1	D3	SMA	JML
IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

IV a	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	3
JML GOL IV	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	-	5
III d			2			2	-	2	10	1	-	13
III c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III b	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	1	3
III a	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
JML GOL III	-	-	4	-	-	4	-	-	3	2	1	19
NON ASN	-	-	-	2	1	3	-	1	5	-	4	11
JML TOTAL	-	-	10	2	1	13	-	9	22	5	6	47

1.5.2. SARANA DAN PRASARANA KERJA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	RODA EMPAT	6
2	RODA DUA	1
3	KOMPUTER / PC	40
4	PRINTER	30
5	LAPTOP	20
6	SCANNER	6
7	AC	8
8	KURSI KERJA	40
9	KURSI RAPAT	24
10	KURSI PEJABAT	6
11	UPS	20

12	UPS SERVER	2
13	MEJA KERJA PEJABAT	7
14	MEJA KERJA	55
15	MEJA RAPAT	2
16	GENSET	1
17	SOFA	6
18	LEMARI ES	6
19	DISPENSER	6
22	KOMPOR GAS	1
24	TANGGA ALUMINIUM	1
25	TELEVISI	3
28	DRONE	1
29	MESIN SIDIK JARI	1
31	SERVER	2
32	CCTV	1
33	PAPAN STRUKTUR	1
34	PAPAN NAMA INSTANSI	1
36	ALMARI BESI	11
37	LEMARI KACA	6
38	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2
40	MESIN POTONG RUMPUT	1
42	ALAT HIASAN (BUNGA)	10
44	MESIN HITUNG	1
45	KURSI BESI (KURSITUNGGU)	2

1.6. SISTEMATIKA LkjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BPKAD Minahasa.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BPKAD Minahasa dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : "Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Transparan dan Akuntabel".

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian

yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
- b. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Sasaran I : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Strategi :

- Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima.
- Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja.
- Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD
- Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
- Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
- Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD Pihak

Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

- Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima
- Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset.
- Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel.
- Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif
- Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah
- Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset
- Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset berbasis IT

Kebijakan

- Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
- Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasiskan *e-government* yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah.

- Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Sasaran II : Terpenuhinya Dokumen Manajemen Perkantoran

Strategi :

- Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset..
- Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD, dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa
- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset berbasis IT.

Kebijakan :

- Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2025 melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, dan 66 Sub Kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEGIATAN :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
9. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
10. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah

SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
11. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.
12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16. Fasilitasi Kunjungan Tamu
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
18. Pengadaan Mebel
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
26. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
27. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
28. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
29. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

30. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
31. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
33. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
34. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
35. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
36. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
37. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
38. Koordinasi pelaksanaan kerjasamadan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
39. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
40. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
41. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
42. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
43. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

44. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
45. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
46. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
47. Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
48. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
49. Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota
50. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
51. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
52. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
53. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
54. Penyusunan Standar Harga
55. Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah
56. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
57. Penyusunan Kebijakan pengelolaan barang milik daerah
58. Penatausahaan Barang Milik Daerah
59. Inventarisasi barang milik daerah
60. Pengamanan Barang Milik Daerah

61. Penilaian Barang Milik Daerah
62. Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan barang milik daerah
63. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
64. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
65. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
66. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan	Perda APBD Tepat Waktu Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu Tepat Waktu

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tinggi	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,06%
	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,50%
	Ratio PAD	8,67%
	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	45%
	Opini Laporan Keuangan	WTP
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	5%
	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,77%
	Manajemen ASET	Ya
Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	80%

Penetapan Kinerja tersebut didukung anggaran sebesar Rp. 290.944.356.432.58,- (Dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus empat

puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah
koma lima puluh delapan).

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada masing-masing bidang. Tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target. ***Dalam Capaian Kinerja organisasi ini Realisasi Anggaran yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian indikator yang ada adalah LRA per tanggal 10 Februari 2026. Dimana data tersebut belum sepenuhnya akurat karena data realisasi anggaran yang akurat adalah data realisasi anggaran yang sudah diaudit oleh BPK atau minimal data unaudit pada Bulan Maret 2026.***

Terhadap hal tersebut, kami telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa menetapkan 2 sasaran dengan 11 indikator yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yaitu :

Tabel 1.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,06%	-13,56%
	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,50%	13,40%
	Ratio PAD	8,67%	10,42%
	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	45%	72,70%
	Opini Laporan Keuangan	WTP	(Sementara dilaksanakan audit BPK)
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	5%	7,66%
	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja	1,77%	10,85%

Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran	dalam APBD tahun sebelumnya		
	Manajemen ASET	Ya	Ya
	Tingkat Pemenuhan Dukungan manajemen perkantoran	80%	80%

Pencapaian 2 sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1.

Meningkatnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TERCAPAI /TIDAK TERCAPAI	PRESEN TASE
1	Perda APBD Tepat Waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TERCAPAI	100 %
2	Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TERCAPAI	100 %
3	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-8,21%	-0,06%	-13,56%	TIDAK TERCAPAI	

4	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP		SEMENTARA PROSES AUDIT BPK
4	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,50%	12,50%	13,40%	TERCAPAI
5	Ratio PAD	25,66%	8,67%	10,42%	TERCAPAI
6	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	64,45%	45%	72,70%	TERCAPAI
7	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	5,18%	5%	7,66%	TERCAPAI
8	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,41%	1,77	10,85%	TIDAK TERCAPAI
10	Manajemen ASET	Ya	Ya	Ya	TERCAPAI

Dari hasil evaluasi terhadap 11 Indikator kinerja tahun 2026 di Badan pengelola keuangan dan asset daerah 7 (Tujuh) diantaranya tercapai yaitu Perda APBD tepat

waktu, tercapai dengan prosentase 100 % dimana Perda APBD 2025 di tetapkan pada tanggal 31 Desember 2024. Untuk Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, juga tercapai dengan prosentase 100 % dimana Perda pertanggungjawaban APBD 2024 ditetapkan pada tanggal 4 September 2025. Untuk Ratio PAD dengan target 8.67% tercapai dengan realisasi 10,42% , Ratio Belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan dengan target 12,50% tercapai dengan realisasi 13,40%. Ratio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditure) dengan target 45% tercapai dengan realisasi 72,70 %, Untuk Deviasi realisasi PAD terhadap total PAD dalam APBD dengan target 5% Tercapai dengan realisasi 7,66% dan untuk Manajemen Aset tercapai. Sedangkan untuk indikator Opini Laporan Keuangan saat ini masih dalam proses audit BPK.

Sedangkan 2 Indikator yang tidak tercapai adalah Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan target -0,06% tidak tercapai dengan realisasi -13,56% dan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD dengan target 1,77% tidak tercapai dengan realisasi 10,85%.

Untuk Indikator Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan target -0,06% tidak tercapai dengan realisasi -13,56%. Dimana hal ini disebabkan perencanaan anggaran Belanja OPD yang tidak realistik atau tidak tepat sehingga realisasi anggaran Belanja OPD tidak maksimal, Hal ini juga disebabkan di tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Minahasa menganggarkan kenaikan Tambahan Penghasilan pegawai terhitung mulai bulan januari 2025 namun untuk persetujuan pembayaran TPP keluar di bulan November 2025 dan pembayaran TPP baru bisa dilakukan di bulan desember 2025. Sehingga menyebabkan kenaikan TPP yang sudah dianggarkan sejak bulan januari sampai November tidak terealisasi dan mengakibatkan Deviasi Realisasi Belanja menjadi tinggi. Secara otomatis juga mempengaruhi indikator Rasio Anggaran

siswa terhadap total belanja dalam APBD karena Anggaran Tambahan penghasilan pegawai yang tidak terealisasi menyebabkan silpa menjadi tinggi.

Tabel 1.3

“Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran”.

NO	INDIKATOR	TAHUN	TARGET	REALISASI	TERCAPAI/ TIDAK	PRESEN TASE
	KINERJA	2023	2024	2024		
1.	Tingkat Pemenuhan Dukungan manajemen perkantoran		80%	80%	TERCAPAI	80%

Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, Untuk target Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran tercapai.

TABEL. 1.5. EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP TINGKAT CAPAIAN KINERJA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		(%) CAPAIAN
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Transparan dan Akuntabel							
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah				277.978.011.038.11	252.555.435.440	90.85%	EFISIEN
-	Perda APBD Tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	100%				
-	Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	100%				
-	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,06%	-13,56%	226.00%				
-	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,50%	13.40%	1.07%				
-	Ratio PAD	8.67%	10,42%	1.20%				

- Opini Laporan Keuangan	WTP	Proses Audit sementara dilaksanakan						
- Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	5%	7,66%	1.53%					
- Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1.77%	10,85%	6.13%					
- Manajemen Aset	Ya	Ya	100%					
Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran								
- Tingkat Pemenuhan Dukungan manajemen perkantoran	80%	80%	80%	12.966.345.394.47	10.054.305.452	90.27	EFISIEN	

Melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian anggaran masih terdapat sisa pagu sehingga dapat disimpulkan bahwa Seluruh indikator sasaran memiliki efisiensi.

TABEL 1.61
ANALISIS INDIKATOR KINEJA SASARAN MENUNJANG / TIDAK

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TINGKAT CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		TINGKAT CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
					URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Transparan dan Akuntabel	WTP	WTP							
	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah			Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah			100%	MENUNJANG
		Perda APBD Tepat waktu	100%		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan perencanaan keuangan Daerah		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	MENUNJANG
		Perda Pertanggungjawa	100%					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	100%	MENUNJANG
								Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
								Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan		

ban APBD Tepat waktu			dan Perubahan PPAS	PPAS yang Disusun		
Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-226.00%		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	MENUNJANG
Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	1.07%		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	MENUNJANG
Ratio PAD	1.20%		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA - SKPD	100%	MENUNJANG
Opini Laporan Keuangan	Audit sementara dilaksanakan		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	100%	MENUNJANG
Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	1.53%		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	100%	MENUNJANG

Ratio Anggaran
sisa terhadap total
belanja dalam
APBD tahun
sebelumnya

6.13%

Daerah tentang Penjabaran APBD	tentang Penjabaran APBD			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%		MENUNJANG
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%		MENUNJANG
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%		MENUNJANG
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koorðinasi Perencanaan	100%		MENUNJANG

			Anggaran Pendapatan		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	MENUNJANG
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	100%	MENUNJANG
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan Belanja Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	MENUNJANG
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	MENUNJANG
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	100%	MENUNJANG

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	MENUNJANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan	100%	MENUNJANG

<p>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</p>	<p>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</p>	<p>100%</p>	<p>MENUNJANG</p>
<p>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data</p>	<p>100%</p>	<p>MENUNJANG</p>

dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%	MENUNJANG
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	100%	MENUNJANG

			Kabupaten/Kota		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	MENUNJANG
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	MENUNJANG
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	100%	MENUNJANG

Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/K ota			
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD	100%	MENUNJANG	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%	MENUNJANG	
Penyusunan Kebijakan dan	Jumlah Kebijakan	100%	MENUNJANG	

		Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun		
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	MENUNJANG
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	100%	MENUNJANG
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang dibina	100%	MENUNJANG
Penunjang Urusan Kewenangan	Persentase Urusan Kewenangan	Analisis Perencanaan dan	Jumlah Laporan Hasil Analisis	100%	MENUNJANG

Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpenuhi	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	MENUNJANG
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	MENUNJANG
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	MENUNJANG
Program Pengelolaan	Persentase meningkatnya Tertib			100%	MENUNJANG

Manajemen Aset	Ya	Barang Milik Daerah	Penatausahaan aset Daerah			100%	MENUNJANG
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	MENUNJANG
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	MENUNJANG
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	MENUNJANG
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	MENUNJANG
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	100%	MENUNJANG

	Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	MENUNJANG
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan	100%	MENUNJANG

Program	Presentase Pemenuhan layanan	Presentase Pemenuhan layanan		
			Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
				100%
				MENUNJANG
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
				100%
				MENUNJANG
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
				100%
				MENUNJANG
Program Penunjang Urusan	Presentase Pemenuhan layanan	Presentase Pemenuhan layanan		100%
				MENUNJANG

	Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang Pemerintah Daerah	Penunjang Pemerintah Daerah			
Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dibuat		100%	MENUNJANG
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100% MENUNJANG
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100% MENUNJANG
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100% MENUNJANG

			Perubahan RKA-SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	MENUNJANG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	MENUNJANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	MENUNJANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100%	MENUNJANG

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	MENUNJANG
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	MENUNJANG
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	MENUNJANG
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	MENUNJANG
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100%	MENUNJANG

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perundang- Undangan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	MENUNJANG

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	MENUNJANG
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	100%	MENUNJANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	MENUNJANG
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	MENUNJANG

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	MENUNJANG
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	MENUNJANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	MENUNJANG
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jasa Perbaikan Mebel	100%	MENUNJANG
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan peralatan dan mesin lainnya	100%	MENUNJANG

B. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	12.966.345.394.47	10.054.305.452.00	77.54
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.843.750	50.918.000,00	41.11
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.661.750	11.652.000,00	92.03
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.166.000	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.966.000	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.878.000	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.976.000	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.976.000	0	0
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.220.000	39.266.000	60.21
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.314.013.030	5.067.775.114	69.29
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.314.013.030	4.993.184.114	69.49
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	78.560.000	74.591.000	94.95
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.351.100.	95.986.500,00	31.96
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	117.668.500	95.986.500,00	81.57
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.682.600	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.927.106.47	828.922.535.00	89.33
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.685.630	13.290.000	97.11
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.288.352	273.336.188,00	76.08
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.108.624.47	15.379.328,00	97.11
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	160.675.500	160.651.061	76.08
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	375.172.000	366.263.958	80.48

LKJIP 2025

Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.650.169.400	2.591.583.818	97.79
18	Pengadaan Mebel	352.948.920	348.262.500	98.67
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.297.220.480	2.243.321.318	97.65
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.211.630.608	986.916.506	81.45
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	100
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.792.000	248.266.926	71.80
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan Umum Kantor	49.030.000	14.076.000	28.71
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	801.806.608	709.573.580	88.50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		438.410.400	432.202.979	98.58
24	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	213.480.000	207.609.979	97.25
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.930.400	224.593.000	99.85
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		248.951.131.445.20	241.778.997.480.00	90.88
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.751.380.537	1.073.255.441	61.28
26	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	319.490.712	198.720.250	62.20
27	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	347.710.590	206.846.040	59.49
28	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	68.2575.00	30.034.000	44.00
29	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	50.028.000	19.500.000	38.98
30	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	8.799.000	0	0

31	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	15.336.000	7.800.000	50.86
32	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	361.109.350	171.682.360	47.54
33	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	404.484.250	281.577.975	69.61
34	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	176.165.135	157.094.816	89.17
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		733.198.410	642.991.390	87.70
35	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	281.465.030	276.395.150	98.20
36	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	94.472.940	93.786.940	99.27
37	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25.792.000	24.166.000	93.70
38	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	14.170.000	12.325.000	86.98
39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31.300.000	25.344.000	80.97
40	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	44.637.500	43.180.000	96.73
41	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	48.748.790	0	0
42	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	192.612.150	167.794.300	87.12

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		817.624.353	594.742.293	72.74
43	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	150.972.473	128.936.373	85.40
44	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	244.304.770	243.083.920	99.50
45	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	129.757.680	87.872.000	67.72
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	175.570.050	134.850.000	76.81
47	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	40.289.690	0	0
48	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.289.690	0	0
49	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36.440.000	0	0
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		273.487.334.112.11	249.245.621.959	91.14
50	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.728.383.319	3.694.624.479	99.09
51	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	241.176.766.200	233.854.701.280	96.96
52	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	20.807.819.347.61	3.922.000.000.00	18.85
53	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.774.365.245.50	7.774.296.200.00	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.188.473.626		84.04
Pengelolaan Barang Milik Daerah				84.04
54	Penyusunan Standar Harga	18.300.000	18.035.000	98.55

55	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.505.500	18.949.200	44.58
56	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	22.380.000	11.095.000	49.58
57	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	194.170.000	183.215.550	94.36
58	Penatausahaan Barang Milik Daerah	369.204.622	338.746.661	91.75
59	Pengamanan Barang Milik Daerah	180.480.504	131.382.700	72.80
60	Penilaian Barang Milik Daerah	31.640.000	16.313.400	51.56
61	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.700.000	14.000.000	83.83
62	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	44.300.000	17.933.000	40.48
63	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	25.920.000	19.080.000	73.61
64	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	178.192.000	172.811.346	96.98
65	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60.875.000	57.262.500	94.07
66	Inventarisasi Barang Milik Daerah	3.806.000	0	0
	JUMLAH	290.944.356.432.58	262.609.740.892	90.26

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu akan diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemicu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian sistem pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.
3. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran yang akan datang dengan mengevaluasi kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.

Sebagai penutup, kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pikiran, fasilitas sehingga tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diucapkan banyak terima kasih.

TONDANO, FEBRUARI 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA**



**DAVID ABRAM MANGUNDAP, SE
PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19720415 200003 1 003